

ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Pada Desa Biting Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember)

Herna Safrida *¹
Niken Riska Amelia ²
Saffana Deinaya Azzarqo ³
Irwania Deby Dhea Puspita ⁴
Asyifa Aviza Zhulfi ⁵
Fais Syah⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Jember, Indonesia

*e-mail: nikenamelia1309@gmail.com¹, irwaniadebbyd@gmail.com², nayahyun1205@gmail.com³

Abstrak

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) secara partisipatif di Desa Biting, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan sangat mempengaruhi kualitas keputusan yang diambil, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan keuangan desa yang baik berkontribusi pada peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, serta perlunya pelatihan bagi aparat desa untuk meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan pembangunan. Implikasi dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi desa lain dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif.

Kata kunci: Keuangan Desa, Pembangunan Desa, Partisipasi Masyarakat, RPJMDes, Tata Kelola, Pemerintahan, Transparansi dan Akuntabilitas

Abstract

The participatory preparation of the Village Medium-Term Development Plan (RPJMDes) in Biting Village, Arjasa District, Jember Regency, aims to enhance transparent and accountable governance as well as promote inclusive and sustainable development. This study employs a qualitative method with a case study approach, involving interviews and observations to gather data. The findings indicate that community participation in the planning process significantly influences the quality of decisions made and enhances public trust in the village government. Furthermore, the study reveals that effective village financial management contributes to improved infrastructure and community welfare. The conclusion emphasizes the importance of transparency and accountability in village financial management, along with the need for training for village officials to enhance professionalism in development management. The implications of this research can serve as a reference for other villages in formulating more effective development policies.

Keywords: Administration, Community Participation, Governance, Transparency and Accountability, Village Development, Village Finance, Village Medium-Term Development Plan (RPJMDes)

PENDAHULUAN

Penelitian ini mengkaji secara mendalam proses perencanaan pembangunan di Desa Biting, dengan fokus pada keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap. Melalui pendekatan partisipatif, desa berhasil mengidentifikasi permasalahan-permasalahan krusial dan merumuskan visi serta misi pembangunan yang jelas. Hasil penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi Desa Biting, tetapi juga menyumbangkan pengetahuan baru dalam bidang perencanaan pembangunan desa. Inovasi dalam penelitian ini terletak pada penerapan metode partisipatif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kontribusi penelitian ini sangat relevan dengan perkembangan terkini dalam pembangunan desa, di mana partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi Desa Biting, tetapi juga dapat menjadi

rujukan bagi desa-desa lain dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat.

Pada penyusunan RPJMDes Desa Biting ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang praktik-praktik terbaik dalam perencanaan pembangunan desa. Dengan melibatkan masyarakat secara partisipatif, penelitian ini selaras dengan situasi terkini dalam pembangunan desa yang menekankan pentingnya kepemilikan masyarakat terhadap proses perencanaan. Penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah inovasi dalam penerapan partisipasi masyarakat, seperti melalui proses Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, telah dilakukan identifikasi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi Desa Biting dalam rangka menambah inovasi terkait pembangunan berkelanjutan, yang sejalan dengan temuan (Manto & Djaelani, 2017) tentang pentingnya inovasi dalam konteks pembangunan desa. Dan juga terdapat hasil musyawarah desa yang kemudian ditindaklanjuti dalam proses penyusunan musrenbangdes. Dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa seluruh lembaga yang ada di desa terlibat, termasuk BPD, perangkat desa, RT, RW, pelindung masyarakat, tokoh masyarakat, organisasi desa, tokoh agama, dan kelompok tani. Namun seringkali terjadi perdebatan dalam diskusi karena setiap lembaga yang ikut serta tentunya sudah memiliki gagasan dan rekomendasi kegiatan sesuai dengan keterwakilannya (Yusuf, M, Romadhon, 2020)

Meskipun demikian, tidak lepas dari temuan studi-studi sebelumnya, seperti penelitian (Walukow et al., 2017), (Maharini, 2019), dan (Monalisa Siagian et al., 2024) yang juga menyoroti berbagai tantangan dalam implementasi partisipasi masyarakat. Peneliti (Betriana et al., 2023) secara khusus menekankan pentingnya mengatasi kesenjangan akses dan kapasitas masyarakat. Dengan melakukan analisis komparatif ini, kita dapat mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang telah diterapkan di Desa Biting dan mengidentifikasi area-area yang masih perlu ditingkatkan, seperti dari data-data yang diperoleh dari kajian mendalam, seperti Potret Desa, Diagram Venn Hubungan Kelembagaan, dan Kalender Musim, memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi desa. Hasil kajian ini menyoroti beberapa permasalahan krusial yang perlu segera ditangani, antara lain permasalahan spesifik yang dihadapi Desa Biting, misalnya: keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas pendidikan, atau kurangnya akses terhadap air bersih. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi desa-desa lain dalam menyusun RPJMDes yang lebih komprehensif dan berorientasi pada masyarakat."

METODE

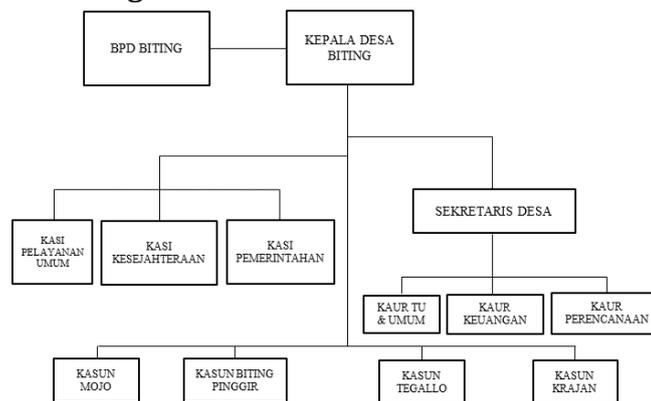
Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder, Data Primer diperoleh dari data hasil wawancara dengan perangkat desa Biting (Kaur keuangan) selaku respondennya, Dan Data Sekunder diperoleh dari Profil Desa Biting dan Dokumen terkait Perencanaan Keuangan desa pada Desa Biting.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Desa Biting

Desa Biting terletak di Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. Desa ini berbatasan dengan Desa SUKOWIRYO di Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember di sebelah utara, Desa PATEMON di Kecamatan Pakusari di sebelah barat, Desa BEDADUNG di Kecamatan Pakusari di sebelah selatan, dan Desa GUMUKSARI di sebelah timur. Desa Biting merupakan sebuah Desa yang berpenduduk kurang lebih **6.537** jiwa dan tersebar di empat dusun: Dusun KRAJAN, Dusun TEGALLO, Dusun MOJO, dan Dusun BITING PINGGIR. Kepala dusun masing-masing dusun bertanggung jawab atas wilayah tersebut. Seiring dengan banyaknya tugas yang diberikan kepada aparat ini oleh Desa, tempat Kasun menjadi sangat strategis. Di Desa Biting, empat dusun dibagi menjadi 12 (Dua Belas) Rukun Warga (RW) dan 51 (Lima Puluh Satu) Rukun Tetangga (RT) untuk memaksimalkan fungsi pelayanan masyarakat. Sebagian besar penduduk Desa Biting bekerja pada sektor Pertanian disusul sektor Industri, Perdagangan, dan Jasa.

Struktur Organisasi Desa Biting



RPJMDes Biting

Dalam penyusunan RPJM Desa pada Desa Biting, terdapat beberapa proses yang harus dilakukan meliputi :

1. Proses Pengkajian Keadaan Desa

Proses pengkajian keadaan Desa adalah kegiatan yang dilakukan untuk memahami secara menyeluruh kondisi dan potensi suatu desa. Dalam Proses ini desa melakukan beberapa tahapan untuk mendapatkan data atau hasil mengenai bagaimana kondisi dan potensi pada suatu Desa tersebut, langkah pertama ialah :

a. Musyawarah Dusun/Kelompok

Penyusunan RPJM Desa di mulai dari penjaringan masalah dan potensi yang ada di desa dengan menggunakan Alat Kajian. Kemudian Hasil Musrenbangdes untuk menyusun RPJM Desa menghasilkan daftar peta permasalahan ini. Musrenbangdes melibatkan masing-masing perwakilan dusun yang bertanggung jawab dan menggunakan alat kaji seperti Potret Desa, Diagram Venn Hubungan Kelembagaan, dan Kalender Musim untuk menggambarkan elemen-elemen yang ada di dalamnya.

b. Musyawarah Desa

Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam musyawarah ditingkat Desa yang dilaksanakan pada 09 Desember 2019 dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Mengkomplikasikan dan Mengelompokan Masalah dari hasil musyawarah Dusun
- 2) Menyusun Sejarah Desa
- 3) Menyusun Visi dan Misi Desa
- 4) Membuat skala prioritas
- 5) Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah.
- 6) Menetapkan tindakan yang layak

2. Rumusan Prioritas Pembangunan Desa

Pada Desa Biting rumusan prioritas pembangunan desa yang hendak dicapai dalam 6 tahun ke depan meliputi 4 bidang mendasar, yaitu :

a. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

- 1) Meningkatkan kualitas pendataan Desa agar diperoleh data yang valid Kegiatannya : Data Desa, Batas Desa, KTP dan KK Masal, dll.
- 2) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa Kegiatannya : Pembangunan Pendopo, Kantor Desa, Pagar Kantor, Gapura dll.
- 3) Penambahan dan penyusunan tata ruang Desa khususnya di bagian pelayanan masyarakat Kegiatannya : Penataan ruangan sesuai jabatan dll.
- 4) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran untuk kegiatan penyelenggaraan musyawarah Desa Kegiatannya : Musyawarah Desa dll.
- 5) Meningkatkan pengelolaan informasi Desa dengan menggunakan internet dan website Kegiatannya : Pengadaan Internet dan website untuk informasi Desa dll.

- 6) Meningkatkan penyelenggaraan perencanaan desa dengan kegiatan tilik dusun secara periodik
Kegiatannya : Musrenbangdes dan Musrenbangdus serta Tilik dusun dll.
 - 7) Mengembangkan jaringan dengan penyelenggaraan kerjasama antar Desa
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 1) Meningkatkan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain; Pembangunan Jalan Desa, jalan pemukiman, jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian, ke sarana pendidikan dan kesehatan lingkungan permukiman masyarakat Desa.
 - 2) Meningkatkan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain ; Pembangunan Gedung Posyandu, air bersih berskala Desa, sanitasi lingkungan, pos pelayanan kesehatan Desa (posyandu),
 - 3) Meningkatkan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain ; pembangunan Gedung Sekolah, Rehab Masjid dan Musholla, taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, pengembangan dan pembinaan sanggar seni .
 - 4) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain : pembentukan dan pengembangan BUMDesa, penguatan permodalan BUM Desa, pembibitan tanaman pangan, lumbung Desa, , kandang ternak, instalasi biogas, perbaikan draenase dan Plengsengan.
 - 5) Meningkatkan dan mengembangkan pelestarian lingkungan hidup antara lain : pembersihan daerah aliran sungai
 - c. Bidang Pembinaan Masyarakat
 - 1) Meningkatkan pembinaan lembaga kemasyarakatan dengan mengikutsertakan dalam setiap event pelatihan
 - 2) Penambahan dan pengadaan sarana dan prasarana olah raga
 - 3) Meningkatkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dengan melengkapi kebutuhan setiap pos kamling.
 - 4) pembinaan kerukunan umat beragama
 - a) Meningkatkan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat.
 - b) melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - 1) Meningkatkan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa.
 - 2) Meningkatkan kegiatan pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan kerjasama dengan pihak ketiga
 - 3) Pengorganisasian melalui Pembentukan dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat
 - 4) Fasilitasi fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel
 - 5) Meningkatkan pelatihan teknologi tepat guna dan ikut serta dalam setiap event kegiatan
 - 6) Meningkatkan kapasitas masyarakat, dengan mempersiapkan anggaran dan kerjasama dengan pihak ketiga untuk kelompok :
 - a) Kader pemberdayaan masyarakat Desa, kelompok usaha ekonomi produktif;
 - b) Kelompok pengrajin, kelompok pemuda.
3. Arah Kebijakan Keuangan Desa dan Program
- a. Arah Kebijakan Keuangan Desa
Dalam era otonomi daerah, setiap Desa diharuskan untuk melakukan kegiatan pembangunan secara mandiri untuk mengurangi ketergantungannya pada pembiayaan pembangunan dari pemerintah daerah dan pusat. Untuk melakukan kegiatan ini, setiap

Desa membutuhkan dana pembangunan, dan setiap Desa harus mampu berusaha mengoptimalkan pendapatannya

b. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa

Kebijakan Keuangan Desa tahun 2020, yang diterima oleh Desa Biting dalam tugasnya, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan Desa melalui sektor Pendapatan Asli Desa dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa adalah :

- 1) Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Desa;
- 2) Meningkatkan Pendapatan Desa dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
- 3) Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Desa;
- 4) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Desa;
- 5) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pungutan Desa;
- 6) Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan Desa.

c. Arah Kebijakan Belanja Desa

Tujuan kebijakan belanja desa ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memastikan bahwa anggaran digunakan dengan efektif dan efisien untuk program dan kegiatan. Ini dicapai melalui penerapan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif, antara lain:

- 1) Esensi utama penggunaan dana APB Desa adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja Desa tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perdes APB Desa secara tepat waktu pula.
- 2) Meningkatkan kualitas anggaran belanja Desa melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.
- 3) Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan visi dan misi Desa.
- 4) Alokasi Anggaran Desa Indikatif
Berdasarkan kemampuan keuangan desa, Visi, Misi , Arah Kebijakan Pembangunan Desa serta prioritas kegiatan maka kebijakan alokasi indikatif belanja desa

d. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Dengan menerapkan anggaran kinerja dalam penyusunan APB Desa, ada kemungkinan adanya defisit atau surplus. Yang pertama terjadi ketika pendapatan lebih rendah daripada belanja, dan yang kedua terjadi ketika pendapatan lebih tinggi daripada belanja. Untuk menutup surplus, pembiayaan Desa diperlukan. Pembiayaan ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk pinjaman desa, sisa perhitungan anggaran yang lebih besar, dana cadangan, dan penjualan aset. Pengeluaran pembiayaan juga diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, seperti pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib selesai, pembiayaan dialokasikan untuk penyertaan modal kepada BUMDes yang berorientasi keuntungan dan berusaha untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah juga menerima pinjaman pihak ketiga.

KESIMPULAN

Penyusunan RPJMDes Desa Biting dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Visi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mencakup tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan ekonomi. Pengelolaan keuangan desa diarahkan pada peningkatan pendapatan asli desa dan pengelolaan belanja yang akuntabel. Prioritas pembangunan desa meliputi

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi.

SARAN

Untuk meningkatkan keberhasilan, partisipasi aktif masyarakat dalam musyawarah desa perlu diperkuat. Transparansi dalam pengelolaan keuangan harus ditingkatkan melalui laporan berkala kepada masyarakat. Aparat desa juga perlu mendapatkan pelatihan agar mampu mengelola desa secara profesional. Pengembangan potensi ekonomi desa, seperti pertanian dan BUMDes, harus menjadi prioritas. Evaluasi program pembangunan perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Betrian, M., Chairani, A., & Prabumulih, U. (2023). Analysis of the Implementation of Village Financial Planing and Reporting Based on Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 in Menanti Village Muara Enim Regency Analisis Penerapan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(4), 3755–3766.
- Maharini, B. P. (2019). Analisis Perencanaan Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Dana Desa Tahun 2018 Di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul). *Jurnal Riset Akuntansi Mercur Buana*, 5(2), 132. <https://doi.org/10.26486/jramb.v5i2.1150>
- Manto, H., & Djaelani, A. Q. (2017). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang). *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 6(4), 39–53.
- Monalisa Siagian, S., Br. Ginting, B., & Hanafi Purba, N. (2024). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tapian Nauli. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(3), 841–845. <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i3.2832>
- Walukow, M. I., Kalangi, L., & Pinatik, S. (2017). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Di Desa Kauneran I Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 266–275. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17616.2017>
- Yusuf, M, Romadhon, et all. (2020). ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. *Journal GEEJ*, 7(2).